



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.1/Kep.612-Org/XII/2024

TENTANG

NOMENKLATUR DAN TITELATUR PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi persuratan perlu ditetapkan nomenklatur dan titelatur Perangkat Daerah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan pada beberapa Perangkat Daerah, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.250-Org/VII/2022 tentang Nomenklatur dan Titelatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 000.8.1/Kep.600-Org/XII/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.250-Org/VII/2022 tentang Nomenklatur dan Titelatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Nomenklatur dan Titelatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
7. Pasal 2 huruf g Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 60);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 92) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 62);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kelurahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 12);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Jatisampurna Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 46);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Bantargebang Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 55);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pondokgede Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 56);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Teluk Pucung Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 16);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 66);
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 68);

19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 100);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 101);
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 103);
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 104);
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 105);
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 106);
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 107);
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 109);
27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 111);
28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 112);

29. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 120);
30. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 114);
31. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 118);
32. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 119);
33. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 120);
34. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 121);
35. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 123);
36. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 125);
37. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 126);
38. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 127);

39. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 128);
40. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 129);
41. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 13);
42. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 45);
43. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
44. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 15);
45. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 33);
46. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 19);
47. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 20);

48. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 21);
49. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 22);
50. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 44);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 000.8.3/477/SETDA.Org tentang Penyusunan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Nomenklatur dan Titelatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, tanggal 25 November 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Nomenklatur dan Titelatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- KEDUA :** Nomenklatur dan Titelatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Nomenklatur dan Titelatur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, digunakan dalam kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan.
- KEEMPAT :** Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :
- a. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.250-Org/VII/2022 tentang Nomenklatur dan Titelatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - b. Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.341-Org/VII/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.250-Org/VII/2022 tentang Nomenklatur dan Titelatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - c. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 000.8.1/Kep.600-Org/XII/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.250-Org/VII/2022 tentang Nomenklatur dan Titelatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA** : Nomenklatur dan titelatur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2024



Tembusan Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 000.8.3/Kep.612-Org/XII/2024
 TENTANG NOMENKLATUR DAN TITELATUR PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

A. DAFTAR NOMENKLATUR, TITELATUR DAN PENGKODEAN DALAM SURAT
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

NO	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH	TITELATUR	PENKODEAN DALAM SURAT
1	SEKRETARIAT DAERAH	SETDA	
	A. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1). BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 2). BAGIAN HUKUM 3). BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4). BAGIAN KERJA SAMA B. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1). BAGIAN PEREKONOMIAN 2). BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 3). BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA C. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 1). BAGIAN UMUM 2). BAGIAN ORGANISASI 3). BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 4). BAGIAN TATA USAHA		Asda I Tapem Huk Kesra KS Asda II Ek Adbang Barjas Asda III Um Org Prokopim TU
2	SEKRETARIAT DPRD	SETWAN	
	A. BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN B. BAGIAN UMUM C. BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN D. BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		PK Umum PP FPP
3	INSPEKTORAT DAERAH	ITKO	
	A. SEKRETARIAT B. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I C. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II D. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III E. INSPEKTUR PEMBANTU URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH F. INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI		Set Irban I Irban II Irban III Irban UPD Irban Inv
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	BAPPERIDA	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI DAN PEMBANGUNAN DAERAH C. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA D. BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM E. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN F. BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH		Set PPEPD PPM PSDA IK RIDA
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPKAD	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG ANGGARAN C. BIDANG PERBENDAHARAAN D. BIDANG AKUNTANSI E. BIDANG ASET		Set Ang Perben Akun Aset
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH		Set P3D

NO	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH	TITELATUR	PENKODEAN DALAM SURAT
	C. BIDANG PELAYANAN, PELAPORAN DAN SISTEM D. BIDANG PENDAPATAN DAERAH E. BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN DAERAH		PPS Penda Wasdalpenda
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR C. BIDANG ADMINISTRASI DAN PENGEMBANGAN KARIR APARATUR D. BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR		Set PKA Adap Pengkom
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESBANGPOL	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA C. BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN D. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI E. BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK		Set Idwasbang Kesbaormas Poldagri Wanasflik
9	DINAS PENDIDIKAN	DISDIK	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR C. BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA D. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT E. BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Set Pem.SD Pem.SMP Pem.PAUIDIKMAS PTK
10	DINAS KESEHATAN	DINKES	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT C. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT D. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN E. BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN		Set Kesmas Gadalkit Yankes SDK
11	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	DISDAMKARMA	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG PENCEGAHAN C. BIDANG PEMADAMAN D. BIDANG PENYELAMATAN E. BIDANG SARANA DAN PRASARANA		Set Gah Dam Mat Sarpras
12	DINAS SOSIAL	DINSOS	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL C. BIDANG REHABILITASI SOSIAL D. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL E. BIDANG PENANGGULANGAN MASYARAKAT MISKIN		Set Linjamsos Rehabsos Pemsos Gulmakin
13	DINAS TENAGA KERJA	DISNAKER	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG PELATIHAN KERJA C. BIDANG PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS D. BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA E. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA		Set Latker P4 Patnaker Hijamsostek

NO	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH	TITELATUR	PENKODEAN DALAM SURAT
14	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	DKPPP	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN C. BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN D. BIDANG PERTANIAN E. BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN F. BIDANG PERIKANAN		Set KDP KKP Pertanian PKH Perikanan
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DLH	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP C. BIDANG PENANGANAN SAMPAH DAN KEMITRAAN D. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN, KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM E. BIDANG PENGURANGAN SAMPAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN		Set TLPKLH PSKM PPKLHPH PSPLB3
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DISDUKCAPIL	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK C. BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL D. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN E. BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN		Set Yanduk Yancasip Infoduk Data
17	DINAS PERHUBUNGAN	DISHUB	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG TEKNIK LALU LINTAS C. BIDANG ANGKUTAN DAN TERMINAL D. BIDANG PRASARANA E. BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL		Set Teklalin Angter Prasarana Dalops
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	DISKOMINFOSTANDI	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK C. BIDANG PERSANDIAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI D. BIDANG E-GOVERNMENT E. BIDANG STATISTIK		Set IKP SANTIK E-GOV Statistik
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPTSP	
	A. SEKRETARIAT		Set
20	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DISPORA	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN C. BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA D. BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA		Set Yanmud Bud.OR Penpres
21	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	DISPARBUD	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG KEPARIWISATAAN C. BIDANG PEMASARAN KEPARIWISATAAN D. BIDANG KEBUDAYAAN E. BIDANG EKONOMI KREATIF		Set Par Pemas Bud Ekraf

NO	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH	TITELATUR	PENKODEAN DALAM SURAT
22	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DISDAGPERIN	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG PERDAGANGAN C. BIDANG PERINDUSTRIAN D. BIDANG METROLOGI E. BIDANG PASAR		Set Dag Industri Metro Pasar
23	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DISKOP UKM	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG KOPERASI C. BIDANG USAHA MIKRO DAN FASILITASI USAHA KECIL DAN MENENGAH D. BIDANG USAHA INFORMAL		Set Kop Mikro KUKM Inf
24	DINAS BINA MARGA DAN SUMBERDAYA AIR	DBMSDA	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG BINA MARGA C. BIDANG SUMBER DAYA AIR D. BIDANG PERENCANAAN DAN JASA KONSTRUKSI E. BIDANG PEMANFAATAN RUANG JALAN DAN TAMAN		Set BM SDA PJK PRJT
25	DINAS TATA RUANG	DISTARU	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG PERENCANAAN RUANG C. BIDANG PEMANFAATAN RUANG D. BIDANG PENGENDALIAN RUANG		Set Renru Faru Dalru
26	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DPPPA	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG), PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA C. BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK D. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK		Set PUG PPKK PHA PPKPA
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DPPKB	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN C. BIDANG KELUARGA BERENCANA D. BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA		Set P4 KB Hankeskel
28	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	DISARPUSDA	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG KEARSIPAN C. BIDANG PENGEMBANGAN DAN INFORMASI KEARSIPAN D. BIDANG PENGEMBANGAN KOLEKSI PENGOLAHAN DAN KONSERVASI BAHAN PERPUSTAKAAN E. BIDANG PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA		Set Arsip PIK PKPKBP PKM
29	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DPKPP	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN C. BIDANG BANGUNAN GEDUNG D. BIDANG PERTANAHAN		Set Rumkim Bandung Tanah
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATPOL PP	
	A. SEKRETARIAT B. BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT		Set Tibumtramas

NO	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH	TITELATUR	PENKODEAN DALAM SURAT
	C. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DAN PERSONIL D. BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN LAINNYA E. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Binmaspers Gak Linmas
31	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. CHASBULLAH ABDULMADJID	RSUD dr.CAM	
	A. BAGIAN KESEKRETARIATAN B. BAGIAN PERENCANAAN C. BAGIAN KEUANGAN D. BIDANG PELAYANAN MEDIK E. BIDANG KEPERAWATAN F. BIDANG PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN		Set Renc Keu Yandik Rawat PPK
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BPBD	
	A. SEKRETARIAT B. SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN C. SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK D. SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI		Set Gahsiaga Darlog Rehab
33	KECAMATAN BEKASI TIMUR	KECAMATAN BEKASI TIMUR	Kc. BT
	A. SEKRETARIAT B. SEKSI PEMERINTAHAN C. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT D. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN F. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN G. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		Set Pem Permas Trantib Ekbang Kesos
34	KECAMATAN BEKASI BARAT	KECAMATAN BEKASI BARAT	Kc. BB
	A. SEKRETARIAT B. SEKSI PEMERINTAHAN C. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT D. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN F. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN G. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		Set Pem Permas Trantib Ekbang Kesos
35	KECAMATAN BEKASI UTARA	KECAMATAN BEKASI UTARA	Kc. BU
	A. SEKRETARIAT B. SEKSI PEMERINTAHAN C. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT D. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN F. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN G. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		Set Pem Permas Trantib Ekbang Kesos
36	KECAMATAN BEKASI SELATAN	KECAMATAN BEKASI SELATAN	Kc. BS
	A. SEKRETARIAT B. SEKSI PEMERINTAHAN C. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT D. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN F. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN G. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		Set Pem Permas Trantib Ekbang Kesos
37	KECAMATAN RAWALUMBU	KECAMATAN RAWALUMBU	Kc. RL
	A. SEKRETARIAT B. SEKSI PEMERINTAHAN C. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT D. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN F. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN G. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		Set Pem Permas Trantib Ekbang Kesos

NO	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH	TITELATUR	PENKODEAN DALAM SURAT
38	KECAMATAN MEDANSATRIA	KECAMATAN MEDANSATRIA	Kc. MS
	A. SEKRETARIAT B. SEKSI PEMERINTAHAN C. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT D. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN F. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN G. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		Set Pem Permas Trantib Ekbang Kesos
39	KECAMATAN PONDOKGEDE	KECAMATAN PONDOKGEDE	Kc. PG
	A. SEKRETARIAT B. SEKSI PEMERINTAHAN C. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT D. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN F. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN G. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		Set Pem Permas Trantib Ekbang Kesos
40	KECAMATAN JATIASIH	KECAMATAN JATIASIH	Kc. JTA
	A. SEKRETARIAT B. SEKSI PEMERINTAHAN C. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT D. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN F. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN G. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		Set Pem Permas Trantib Ekbang Kesos
41	KECAMATAN BANTARGEBAH	KECAMATAN BANTARGEBAH	Kc. BTG
	A. SEKRETARIAT B. SEKSI PEMERINTAHAN C. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT D. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN F. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN G. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		Set Pem Permas Trantib Ekbang Kesos
42	KECAMATAN JATISAMPURNA	KECAMATAN JATISAMPURNA	Kc. JSP
	A. SEKRETARIAT B. SEKSI PEMERINTAHAN C. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT D. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN F. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN G. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		Set Pem Permas Trantib Ekbang Kesos
43	KECAMATAN PONDOKMELATI	KECAMATAN PONDOKMELATI	Kc. PM
	A. SEKRETARIAT B. SEKSI PEMERINTAHAN C. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT D. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN F. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN G. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		Set Pem Permas Trantib Ekbang Kesos
44	KECAMATAN MUSTIKAJAYA	KECAMATAN MUSTIKAJAYA	Kc. MTJ
	A. SEKRETARIAT B. SEKSI PEMERINTAHAN C. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT D. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN F. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN G. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		Set Pem Permas Trantib Ekbang Kesos

**B. DAFTAR NOMENKLATUR, TITELATUR DAN PENGKODEAN DALAM SURAT
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

NO	NOMENKLATUR UPTB/UPTD	TITELATUR	PENKODEAN DALAM SURAT
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	A. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH BEKASI TIMUR B. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH BEKASI BARAT C. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH BEKASI UTARA D. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH BEKASI SELATAN E. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH MEDANSATRIA F. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH RAWALUMBU G. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH BANTARGEBAANG H. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH MUSTIKAJAYA I. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH JATIASIH J. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH PONDOKGEDE K. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH JATISAMPURNA L. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH PONDOKMELATI	UPTD PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WIL. BEKASI TIMUR UPTD PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WIL. BEKASI TIMUR UPTD PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WIL. BEKASI TIMUR UPTD PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WIL. BEKASI SELATAN UPTD PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WIL. MEDANSATRIA UPTD PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WIL. RAWALUMBU UPTD PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WIL. BANTARGEBAANG UPTD PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WIL. MUSTIKAJAYA UPTD PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WIL. JATIASIH UPTD PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WIL. PONDOKGEDE UPTD PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WIL. JATISAMPURNA UPTD PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WIL. PONDOKMELATI	PR. BT PR. BB PR. BU PR. BS PR. MS PR. RL PR. BTG PR. MTJ PR. JTA PR. PG PR. JSP PR. PM
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	A. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN B. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN HUTAN KOTA C. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERBENGKELAN D. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR E. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBERSIHAN JALUR PROTOKOL F. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBERSIHAN JALUR KONTAINER G. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBERSIHAN WILAYAH BEKASI TIMUR H. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBERSIHAN WILAYAH BEKASI BARAT I. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBERSIHAN WILAYAH BEKASI UTARA J. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBERSIHAN WILAYAH BEKASI SELATAN K. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBERSIHAN WILAYAH MEDANSATRIA L. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBERSIHAN WILAYAH RAWALUMBU M. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBERSIHAN WILAYAH BANTARGEBAANG N. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBERSIHAN WILAYAH MUSTIKAJAYA O. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBERSIHAN WILAYAH JATIASIH P. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBERSIHAN WILAYAH PONDOKGEDE Q. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBERSIHAN WILAYAH JATISAMPURNA R. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBERSIHAN WILAYAH PONDOKMELATI	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN UPTD TAMAN HUTAN KOTA UPTD PERBENGKELAN UPTD TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR UPTD KEBERSIHAN JALUR PROTOKOL UPTD KEBERSIHAN JALUR KONTAINER UPTD KEBERSIHAN WIL. BEKASI TIMUR UPTD KEBERSIHAN WIL. BEKASI BARAT UPTD KEBERSIHAN WIL. BEKASI UTARA UPTD KEBERSIHAN WIL. BEKASI SELATAN UPTD KEBERSIHAN WIL. MEDANSATRIA UPTD KEBERSIHAN WIL. RAWALUMBU UPTD KEBERSIHAN WIL. BANTARGEBAANG UPTD KEBERSIHAN WIL. MUSTIKAJAYA UPTD KEBERSIHAN WIL. JATIASIH UPTD KEBERSIHAN WIL. PONDOKGEDE UPTD KEBERSIHAN WIL. JATISAMPURNA UPTD KEBERSIHAN WIL. PONDOKMELATI	Lab.Ling THK PBK TPA KJP KJK Kbs. BT Kbs. BB Kbs. BU Kbs. BS Kbs. MS Kbs. RL Kbs. BTG Kbs. MTJ Kbs. JTA Kbs. PG Kbs. JSP Kbs. PM

NO	NOMENKLATUR UPTB/UPTD	TITELATUR	PENKODEAN DALAM SURAT
3	DINAS PERHUBUNGAN		
A.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LALU LINTAS, ANGKUTAN DAN PARKIR WILAYAH BEKASI TIMUR	UPTD LALIN, ANGKUTAN DAN PARKIR WIL. BEKASI TIMUR	LLAP. BT
B.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LALU LINTAS, ANGKUTAN DAN PARKIR WILAYAH BEKASI BARAT	UPTD LALIN, ANGKUTAN DAN PARKIR WIL. BEKASI BARAT	LLAP. BB
C.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LALU LINTAS, ANGKUTAN DAN PARKIR WILAYAH BEKASI UTARA	UPTD LALIN, ANGKUTAN DAN PARKIR WIL. BEKASI UTARA	LLAP. BU
D.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LALU LINTAS, ANGKUTAN DAN PARKIR WILAYAH BEKASI SELATAN	UPTD LALIN, ANGKUTAN DAN PARKIR WIL. BEKASI SELATAN	LLAP. BS
E.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LALU LINTAS, ANGKUTAN DAN PARKIR WILAYAH MEDANSATRIA	UPTD LALIN, ANGKUTAN DAN PARKIR WIL. MEDANSATRIA	LLAP. MS
F.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LALU LINTAS, ANGKUTAN DAN PARKIR WILAYAH RAWALUMBU	UPTD LALIN, ANGKUTAN DAN PARKIR WIL. RAWALUMBU	LLAP. RL
G.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LALU LINTAS, ANGKUTAN DAN PARKIR WILAYAH BANTARGEBAK	UPTD LALIN, ANGKUTAN DAN PARKIR WIL. BANTARGEBAK	LLAP. BTG
H.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LALU LINTAS, ANGKUTAN DAN PARKIR WILAYAH MUSTIKAJAYA	UPTD LALIN, ANGKUTAN DAN PARKIR WIL. MUSTIKAJAYA	LLAP. MTJ
I.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LALU LINTAS, ANGKUTAN DAN PARKIR WILAYAH JATIASIH	UPTD LALIN, ANGKUTAN DAN PARKIR WIL. JATIASIH	LLAP. JTA
J.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LALU LINTAS, ANGKUTAN DAN PARKIR WILAYAH PONDOKGEDE	UPTD LALIN, ANGKUTAN DAN PARKIR WIL. PONDOKGEDE	LLAP. PG
K.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LALU LINTAS, ANGKUTAN DAN PARKIR WILAYAH JATISAMPURNA	UPTD LALIN, ANGKUTAN DAN PARKIR WIL. JATISAMPURNA	LLAP. JSP
L.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LALU LINTAS, ANGKUTAN DAN PARKIR WILAYAH PONDOKMELATI	UPTD LALIN, ANGKUTAN DAN PARKIR WIL. PONDOKMELATI	LLAP. PM
M.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENERANGAN JALAN UMUM WILAYAH I	UPTD PPJU WIL.I	PPJU WIL.I
N.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENERANGAN JALAN UMUM WILAYAH II	UPTD PPJU WIL.II	PPJU WIL.II
4	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA GEDUNG OLAHRAGA	UPTD PENGELOLA GEDUNG OLAHRAGA	GOR
5	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR		
A.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN JALAN, JEMBATAN DAN SALURAN WILAYAH BEKASI TIMUR	UPTD PJJS WIL. BEKASI TIMUR	PJJS.BT
B.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN JALAN, JEMBATAN DAN SALURAN WILAYAH BEKASI BARAT	UPTD PJJS WIL. BEKASI BARAT	PJJS.BB
C.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN JALAN, JEMBATAN DAN SALURAN WILAYAH BEKASI UTARA	UPTD PJJS WIL.BEKASI UTARA	PJJS.BU
D.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN JALAN, JEMBATAN DAN SALURAN WILAYAH BEKASI SELATAN	UPTD PJJS WIL. BEKASI SELATAN	PJJS.BS
E.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN JALAN, JEMBATAN DAN SALURAN WILAYAH MEDANSATRIA	UPTD PJJS WIL.MEDANSATRIA	PJJS.MS
F.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN JALAN, JEMBATAN DAN SALURAN WILAYAH RAWALUMBU	UPTD PJJS WIL. RAWALUMBU	PJJS.RL
G.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN JALAN, JEMBATAN DAN SALURAN WILAYAH BANTARGEBAK	UPTD PJJS KEC. BANTARGEBAK	PJJS.BTG
H.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN JALAN, JEMBATAN DAN SALURAN WILAYAH MUSTIKAJAYA	UPTD PJJS WIL. MUSTIKAJAYA	PJJS.MJ

NO	NOMENKLATUR UPTB/UPTD	TITELATUR	PENKODEAN DALAM SURAT
	I. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN JALAN, JEMBATAN DAN SALURAN WILAYAH JATIASIH	UPTD PJJJ WIL. JATIASIH	PJJJ.JTA
	J. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN JALAN, JEMBATAN DAN SALURAN WILAYAH PONDOKGEDE	UPTD PJJJ WIL. PONDOKGEDE	PJJJ.PG
	K. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN JALAN, JEMBATAN DAN SALURAN WILAYAH JATISAMPURNA	UPTD PJJJ WIL. JATISAMPURNA	PJJJ.JSP
	L. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN JALAN, JEMBATAN DAN SALURAN WILAYAH PONDOKMELATI	UPTD PJJJ WIL. PONDOKMELATI	PJJJ.PM
	M. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH ALAT BERAT DAN PERBENGKELAN	UPTD ABP	ABP
	N. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMATUSAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN AIR	UPTD PPBA	PPBA
	O. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERTAMANAN WILAYAH I	UPTD PERTAMANAN WIL.I	Taman.I
	P. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERTAMANAN WILAYAH II	UPTD PERTAMANAN WIL.II	Taman.II
6	DINAS TATA RUANG		
	A. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN BANGUNAN WILAYAH I	UPTD WASBANG WIL.I	Wasbang.I
	B. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN BANGUNAN WILAYAH II	UPTD WASBANG WIL.II	Wasbang.II
	C. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN BANGUNAN WILAYAH III	UPTD WASBANG WIL.III	Wasbang.III
	D. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN BANGUNAN WILAYAH IV	UPTD WASBANG WIL.IV	Wasbang.IV
	E. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN BANGUNAN WILAYAH V	UPTD WASBANG WIL.V	Wasbang.V
	F. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN BANGUNAN WILAYAH VI	UPTD WASBANG WIL.VI	Wasbang.VI
7	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	A. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK WILAYAH BEKASI TIMUR	UPTD PP WIL.BEKASI TIMUR	PP.BT
	B. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK WILAYAH BEKASI BARAT	UPTD PP WIL.BEKASI BARAT	PP.BB
	C. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK WILAYAH BEKASI UTARA	UPTD PP WIL.BEKASI UTARA	PP.BU
	D. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK WILAYAH BEKASI SELATAN	UPTD PP WIL.BEKASI SELATAN	PP.BS
	E. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK WILAYAH MEDANSATRIA	UPTD PP WIL.MEDANSATRIA	PP.MS
	F. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK WILAYAH RAWALUMBU	UPTD PP WIL.RAWALUMBU	PP.RL
	G. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK WILAYAH BANTARGEBAH	UPTD PP WIL.BANTARGEBAH	PP.BTG
	H. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK WILAYAH MUSTIKAJAYA	UPTD PP WIL.MUSTIKAJAYA	PP.MJ
	I. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK WILAYAH JATIASIH	UPTD PP WIL.JATIASIH	PP.JTA
	J. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK WILAYAH PONDOKGEDE	UPTD PP WIL.PONDOKGEDE	PP.PG

NO	NOMENKLATUR UPTB/UPTD	TITELATUR	PENKODEAN DALAM SURAT
	K. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK WILAYAH JATISAMPURNA	UPTD PP WIL.JATISAMPURNA	PP.JSP
	L. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK WILAYAH PONDOKMELATI	UPTD PP WIL.PONDOKMELATI	PP.PM
8	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN		
	A. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN	UPTD RPH	RPH
	B. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KLINIK DAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINIER	UPTD KLINIK LAB KESWAN KESMAVET	Klinik
	C. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBUDIDAYAAN IKAN HIAS	UPTD PEMBUDIDAYAAN IKAN HIAS	PIH
9	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	A. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)	UPTD RUSUNAWA	Rusunawa
	B. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	UPTD PALD	PALD
	C. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMAKAMAN	UPTD PEMAKAMAN	Makam
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	A. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	UPTD PPA	PPA
11	DINAS KESEHATAN		
	A. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D JATISAMPURNA	RSUD KELAS D JATISAMPURNA	RSUD.JSP
	B. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D BANTARGEBAH	RSUD KELAS D BANTARGEBAH	RSUD.BTG
	C. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PONDOKGEDE	RSUD KELAS D PONDOKGEDE	RSUD.PG
	D. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D TELUK PUCUNG	RSUD KELAS D TELUK PUCUNG	RSUD.TP
	E. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	UPTD LABKESDA	Lab.Kesda
	F. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI	UPTD IF	IF
	G. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ARENJAYA	UPTD PUSKESMAS ARENJAYA	PKM.Aj
	H. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BANTARGEBAH	UPTD PUSKESMAS BANTARGEBAH	PKM.Btg
	I. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MUSTIKAJAYA	UPTD PUSKESMAS MUSTIKAJAYA	PKM.Mtj
	J. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BINTARA	UPTD PUSKESMAS BINTARA	PKM.Btr
	K. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BINTARAJAYA	UPTD PUSKESMAS BINTARAJAYA	PKM.Btj
	L. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BOJONG RAWALUMBU	UPTD PUSKESMAS BOJONG RAWALUMBU	PKM.Brl
	M. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BOJONGMENTENG	UPTD PUSKESMAS BOJONGMENTENG	PKM.Bm
	N. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DURENJAYA	UPTD PUSKESMAS DURENJAYA	PKM.Dj
	O. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JAKAMULYA	UPTD PUSKESMAS JAKAMULYA	PKM.Jm
	P. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JATIASIH	UPTD PUSKESMAS JATIASIH	PKM.Jta
	Q. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JATIBENING	UPTD PUSKESMAS JATIBENING	PKM.Jtb
	R. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JATILUHUR	UPTD PUSKESMAS JATILUHUR	PKM.Jtl
	S. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JATIMAKMUR	UPTD PUSKESMAS JATIMAKMUR	PKM.Jmm
	T. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JATIRAHAYU	UPTD PUSKESMAS JATIRAHAYU	PKM.Jtr
	U. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JATISAMPURNA	UPTD PUSKESMAS JATISAMPURNA	PKM.Jsp

NO	NOMENKLATUR UPTB/UPTD	TITELATUR	PENKODEAN DALAM SURAT
V.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JATIWARNA	UPTD PUSKESMAS JATIWARNA	PKM.Jtw
W.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALIABANG TENGAH	UPTD PUSKESMAS KALIABANG TENGAH	PKM.Kt
X.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTABARU	UPTD PUSKESMAS KOTABARU	PKM.Kb
Y.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KARANGKITRI	UPTD PUSKESMAS KARANGKITRI	PKM.Kk
Z.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KRANJI	UPTD PUSKESMAS KRANJI	PKM.Krj
AA.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MARGAJAYA	UPTD PUSKESMAS MARGAJAYA	PKM.Mj
AB.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MARGAMULYA	UPTD PUSKESMAS MARGAMULYA	PKM.Mm
AC.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEJUANG	UPTD PUSKESMAS PEJUANG	PKM.Pjg
AD.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEKAYONJAYA	UPTD PUSKESMAS PEKAYONJAYA	PKM.Pj
AE.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PENGASINAN	UPTD PUSKESMAS PENGASINAN	PKM.Pgs
AF.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PERUMNAS II	UPTD PUSKESMAS PERUMNAS II	PKM.Perum2
AG.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PONDOKGEDE	UPTD PUSKESMAS PONDOKGEDE	PKM.Pg
AH.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWATEMBAGA	UPTD PUSKESMAS RAWATEMBAGA	PKM.Rwtbg
AI.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEROJA	UPTD PUSKESMAS SEROJA	PKM.Srj
AJ.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TELUK PUCUNG	UPTD PUSKESMAS TELUK PUCUNG	PKM.Tp
AK.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BEKASI JAYA	UPTD PUSKESMAS BEKASI JAYA	PKM.Bj
AL.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JATIRANGGON	UPTD PUSKESMAS JATIRANGGON	PKM.Jrg
AM.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PERWIRA	UPTD PUSKESMAS PERWIRA	PKM.Prw
AN.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEDURENAN	UPTD PUSKESMAS PEDURENAN	PKM.Pdr
AO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIKETINGUDIK	UPTD PUSKESMAS CIKETINGUDIK	PKM.Cu
AP.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALIBARU	UPTD PUSKESMAS KALIBARU	PKM.Klbr
AQ.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JAKASETIA	UPTD PUSKESMAS JAKASETIA	PKM.Js
AR.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIMUNING	UPTD PUSKESMAS CIMUNING	PKM.Cmn
AS.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT HARAPANBARU	UPTD PUSKESMAS HARAPANBARU	PKM.Hb
AT.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JATIBENING BARU	UPTD PUSKESMAS JATIBENING BARU	PKM.Jb
AU.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MUSTIKASARI	UPTD PUSKESMAS MUSTIKASARI	PKM.Ms
AV.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUMURBATU	UPTD PUSKESMAS SUMURBATU	PKM.Sb
AW.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JATIKARYA	UPTD PUSKESMAS JATIKARYA	PKM.Jkr
AX.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JATIMEKAR	UPTD PUSKESMAS JATIMEKAR	PKM.Jtm
AY.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JATIKRAMAT	UPTD PUSKESMAS JATIKRAMAT	PKM.Jtk
AZ.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT HARAPANMULYA	UPTD PUSKESMAS HARAPANMULYA	PKM.Hm
BA.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MEDANSATRIA	UPTD PUSKESMAS MEDANSATRIA	PKM.Ms

**C. DAFTAR NOMENKLATUR, TITELATUR DAN PENGKODEAN DALAM SURAT
PADA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

NO	NOMENKLATUR	TITELATUR	PENKODEAN DALAM SURAT
1	KECAMATAN BEKASI TIMUR	KECAMATAN BEKASI TIMUR	Kc. BT
	A. KELURAHAN BEKASIJAYA B. KELURAHAN MARGAHAYU C. KELURAHAN DURENJAYA D. KELURAHAN ARENJAYA		Kl. Bj Kl. Mgh Kl. Dj Kl. Aj
2	KECAMATAN BEKASI BARAT	KECAMATAN BEKASI BARAT	Kc. BB
	A. KELURAHAN BINTARA B. KELURAHAN KRANJI C. KELURAHAN KOTABARU D. KELURAHAN BINTARAJAYA E. KELURAHAN JAKASAMPURNA		Kl. Btr Kl. Krj Kl. Kb Kl. Btj Kl. Jksp
3	KECAMATAN BEKASI UTARA	KECAMATAN BEKASI UTARA	Kc. BU
	A. KELURAHAN KALIABANG TENGAH B. KELURAHAN PERWIRA C. KELURAHAN HARAPANBARU D. KELURAHAN TELUK PUCUNG E. KELURAHAN MARGAMULYA F. KELURAHAN HARAPANJAYA		Kl. Kt Kl. Prw Kl. Hb Kl. Tp Kl. Mm Kl. Hj
4	KECAMATAN BEKASI SELATAN	KECAMATAN BEKASI SELATAN	Kc. BS
	A. KELURAHAN PEKAYONJAYA B. KELURAHAN MARGAJAYA C. KELURAHAN JAKAMULYA D. KELURAHAN JAKASETIA E. KELURAHAN KAYURINGINJAYA		Kl. Pj Kl. Mj Kl. Jm Kl. Js Kl. Kj
5	KECAMATAN RAWALUMBU	KECAMATAN RAWALUMBU	Kc. RL
	A. KELURAHAN BOJONG RAWALUMBU B. KELURAHAN PENGASINAN C. KELURAHAN SEPAJANGJAYA D. KELURAHAN BOJONGMENTENG		Kl. Brl Kl. Pgs Kl. Sj Kl. Bm
6	KECAMATAN MEDANSATRIA	KECAMATAN MEDANSATRIA	Kc. MS
	A. KELURAHAN MEDANSATRIA B. KELURAHAN HARAPANMULYA C. KELURAHAN PEJUANG D. KELURAHAN KALIBARU		Kl. Ms Kl. Hm Kl. Pjg Kl. Klb
7	KECAMATAN PONDOKGEDE	KECAMATAN PONDOKGEDE	Kc. PG
	A. KELURAHAN JATIWARINGIN B. KELURAHAN JATIBENING BARU C. KELURAHAN JATIMAKMUR D. KELURAHAN JATICEMPAKA E. KELURAHAN JATIBARU		Kl. Jwr Kl. Jtb Kl. Jmm Kl. Jtc Kl. Jbb
8	KECAMATAN JATIASIH	KECAMATAN JATIASIH	Kc. JTA
	A. KELURAHAN JATIASIH B. KELURAHAN JATIMEKAR C. KELURAHAN JATIKRAMAT D. KELURAHAN JATIRASA E. KELURAHAN JATILUHUR F. KELURAHAN JATISARI		Kl. Jta Kl. Jtm Kl. Jtk Kl. Jrs Kl. Jtl Kl. Jts
9	KECAMATAN BANTARGEBAK	KECAMATAN BANTARGEBAK	Kc. BTG
	A. KELURAHAN BANTARGEBAK B. KELURAHAN SUMURBATU C. KELURAHAN CIKIWUL D. KELURAHAN CIKETINGUDIK		Kl. Btg Kl. Sb Kl. Ckw Kl. Cu
10	KECAMATAN JATISAMPURNA	KECAMATAN JATISAMPURNA	Kc. JSP
	A. KELURAHAN JATISAMPURNA B. KELURAHAN JATIKARYA C. KELURAHAN JATIRANGGON D. KELURAHAN JATIRANGGA E. KELURAHAN JATIRADEN		Kl. Jsp Kl. Jkr Kl. Jrg Kl. Jra Kl. Jrd

NO	NOMENKLATUR	TITELATUR	PENKODEAN DALAM SURAT
11	KECAMATAN PONDOKMELATI	KECAMATAN PONDOKMELATI	Kc. PM
	A. KELURAHAN JATTRAHAYU B. KELURAHAN JATWARNA C. KELURAHAN JATMELATI D. KELURAHAN JATIMURNI		Kl. Jtr Kl. Jtw Kl. Jml Kl. Jtn
12	KECAMATAN MUSTIKAJAYA	KECAMATAN MUSTIKAJAYA	Kc. MTJ
	A. KELURAHAN MUSTIKAJAYA B. KELURAHAN MUSTIKASARI C. KELURAHAN PADURENAN D. KELURAHAN CIMUNING		Kl. Mtj Kl. Mis Kl. Pdr Kl. Cmn

Pj. WALI KOTA BEKASI.



R. GANI MUHAMAD